

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi reformasi birokrasi dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Jambi, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh dari studi kepustakaan, observasi, serta wawancara dengan pihak terkait. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif yang memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pembangunan Zona Integritas. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, bahwa implementasi reformasi birokrasi di Kanwil BPN Provinsi Jambi telah dilakukan melalui berbagai strategi, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja, serta optimalisasi pengawasan internal. Namun, hingga saat ini, Kanwil BPN Provinsi Jambi belum berhasil memperoleh predikat WBK, yang mengindikasikan bahwa upaya reformasi birokrasi yang telah dilakukan belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan. Kedua, penelitian ini menemukan bahwa hambatan utama dalam mewujudkan WBK meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman aparatur terhadap konsep reformasi birokrasi, serta belum optimalnya sistem evaluasi dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, seperti peningkatan kapasitas pegawai, penyempurnaan mekanisme pengawasan, serta penguatan komitmen seluruh elemen organisasi dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci : Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of bureaucratic reform in establishing an Integrity Zone towards a Corruption-Free Area (WBK) within the Regional Office of the National Land Agency (Kanwil BPN) of Jambi Province and to identify the challenges encountered in the process. This research employs an empirical legal research method with a qualitative descriptive approach to analyze data obtained from literature studies, observations, and interviews with relevant parties. Data analysis is conducted using a descriptive analysis method, providing a detailed, systematic, and comprehensive overview of the implementation of bureaucratic reform in the development of the Integrity Zone. The findings of this study reveal, first, that the implementation of bureaucratic reform at the Kanwil BPN of Jambi Province has been carried out through various strategies, such as improving public service quality, strengthening performance accountability, and optimizing internal supervision. However, to date, the Kanwil BPN of Jambi Province has not yet succeeded in obtaining the WBK status, indicating that the bureaucratic reform efforts undertaken have not fully met the established standards. Second, this study identifies key obstacles in achieving WBK, including limited human resources, a lack of understanding among officials regarding bureaucratic reform, and an underdeveloped evaluation and supervision system. Therefore, a more comprehensive strategy is required, including enhancing staff capacity, refining supervision mechanisms, and strengthening the commitment of all organizational elements to establish a clean, transparent, and accountable bureaucracy.

Keywords: Bureaucratic Reform, Integrity Zone, Corruption-Free Area (WBK)